

**MANAJEMEN KONFLIK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR (TPA) REGIONAL PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

**RUWEISHA
NPM. 2116041032**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MANAJEMEN KONFLIK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR (TPA) REGIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Oleh
RUWEISHA

SKRIPSI

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada
**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

MANAJEMEN KONFLIK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) REGIONAL PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RUWEISHA

Pengelolaan sampah di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan praktik *open dumping* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Untuk mengatasinya Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pembangunan TPA Regional di Desa Tanjung Sari, Lampung Selatan sejak tahun 2019. Rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen konflik dalam pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung dengan pendekatan kualitatif dalam desain studi kasus untuk memahami dinamika konflik dan strategi penyelesaiannya. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan tahapan manajemen konflik Stevenin (1997), menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan yang buruk, terutama akibat ketiadaan dokumen AMDAL untuk menilai dampak lingkungan dan kesehatan. Kurangnya transparansi, dan lemahnya komunikasi yang memperburuk kepercayaan publik terhadap proyek. Penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat, komunikasi langsung, keterbukaan informasi, kompensasi adil, serta edukasi dan studi banding. Secara teknis, pemilahan sampah dari sumber dan penerapan teknologi ramah lingkungan sangat penting untuk efektivitas pengelolaan sampah. Di sisi kebijakan, penyusunan AMDAL merupakan dasar untuk pembangunan yang bertanggung jawab dan juga berkelanjutan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, komunikasi yang konsisten, dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan FGD sebelumnya tidak efektif dalam menyelesaikan konflik karena belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, TPA Regional, Manajemen Konflik

ABSTRACT

CONFLICT MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL FINAL PROCESSING SITE (TPA) IN LAMPUNG PROVINCE

By

RUWEISHA

Waste management in Lampung Province faces significant challenges, particularly regarding open dumping practices at the Final Disposal Site (TPA), which negatively impact the environment and public health. To address this, the Lampung Provincial Government has planned the construction of a Regional TPA in Tanjung Sari Village, South Lampung, since 2019. However, the plan has faced strong opposition from the local community. This study aims to analyze conflict management in the development of the Regional TPA in Lampung Province using a qualitative case study approach to understand the dynamics of the conflict and its resolution strategies. Based on Stevenin's (1997) conflict management stages, the findings reveal that the conflict was triggered by public concerns about poor management, primarily due to the absence of an Environmental Impact Assessment (AMDAL) document to evaluate environmental and health risks. A lack of transparency, and weak communication further eroded public trust in the project. Conflict resolution requires an integrated approach involving the community, direct communication, information transparency, fair compensation, education, and benchmarking. Technically, waste segregation at the source and the implementation of environmentally friendly technologies are essential for effective waste management. From a policy perspective, preparing AMDAL is key to responsible and sustainable development. The success of the implementation is highly dependent on cross-sector coordination, consistent communication, and continuous evaluation. The evaluation indicates that previous Focus Group Discussions (FGDs) were ineffective in resolving the conflict as they failed to accommodate the community's aspirations fully.

Keywords: Waste Management, Regional TPA, Conflict Management

Judul Skripsi

: **MANAJEMEN KONFLIK PEMBANGUNAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
REGIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Ruweisha**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116041032**

Program Studi

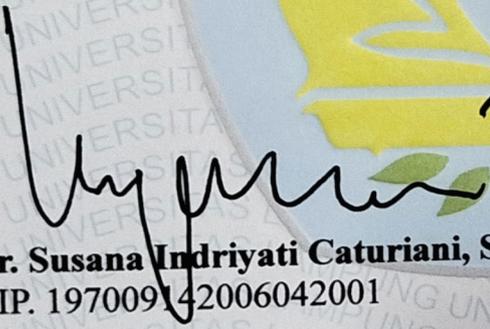
: **Ilmu Administrasi Negara**

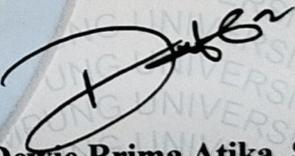
Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

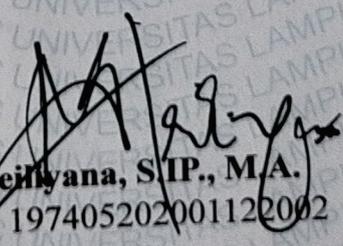
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 197009142006042001


Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.
NIP. 198212122008012017

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**


Meilyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**

Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**

Penguji : **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **5 Juni 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Ruweisha
NPM. 2116041032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ruweisha yang lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Mei 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Agung Ganef Kartika dan Ibu Agustina Siregar. Penulis memulai pendidikan formalnya dari Taman Kanak-Kanak (TK) Utama Hikmah di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Gulak Galik Kota Bandar Lampung. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 18 Bandar Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan Studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi internal kampus. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota Bidang Hubungan Luar. Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Tim Redaksi dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Penulis juga telah menjalankan magang di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung selama 6 bulan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3).

MOTTO

"Saat engkau memanjatkan doa kepada-Nya, berbicaralah dengan hati yang meyakini penuh bahwa Dia akan menjawabnya."

(HR. At-Tirmidzi)

"Kebaikan terbaik adalah yang dilakukan secara terus menerus meskipun kecil."

(HR. Bukhari)

"Tuhan tidak selalu ada di semua tempat sekaligus, karena itu Dia menciptakan sosok Ibu di dunia."

(REPLY 1988)

"Aku merasa tenang karena menyadari bahwa apa yang tidak aku peroleh memang bukan takdirku, dan apa yang memang ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku."

(Ummar Bin Khattab)

"When life gets you down you know what you've gotta do? Just keep swimming."

(Finding Nemo)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Dengan izin-Nya penulis diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa pertolongan dan ridho-Nya pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Dengan tulus dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Agung Ganef Kartika dan Ibu Agustina Siregar. Segala pencapaian ini tidak lepas dari doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan mereka yang tidak pernah putus dalam menemani penulis selama menjalani proses penelitian. Terima kasih atas kesabaran, penguatan, dan segala bentuk dukungan moral maupun materiil yang telah menjadi sumber kekuatan saat penulis hampir putus asa. Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih karena dianugerahi sosok orang tua yang tangguh, penuh cinta, dan ketulusan yang senantiasa mendampingi penulis hingga tercapainya mimpi menjadi sarjana Ilmu Administrasi Negara. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan bapak dan ibu dengan pahala yang berlipat ganda serta senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amiin.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Manajemen Konflik Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung**” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau. Penulis menyadari bahwa selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi. Namun, berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas segala ilmu, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, dan masukan yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran Ibu dalam membimbing penulis merupakan bentuk ketulusan yang sangat berarti. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang begitu besar, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Ibu telah menjadi panutan yang menginspirasi, dan setiap hal yang Ibu berikan akan selalu penulis kenang sebagai bagian penting dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk Ibu dan keluarga dalam setiap langkah ke depan.
2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas segala ilmu, doa, bimbingan, perhatian, motivasi, saran, masukan, dan nasihat yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan ketulusan Ibu dalam membimbing telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Setiap materi dan wawasan yang Ibu

sampaikan memperkaya pemahaman akademik penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah Ibu, serta memberikan kebahagiaan bagi seluruh keluarga.

3. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. selaku dosen penguji. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan bekal pengetahuan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa, motivasi, bimbingan, serta kemudahan yang telah Prof. berikan dalam setiap tahapan yang penulis jalani. Semoga Prof. Intan beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala urusan.
4. Bapak Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, saran, dan masukan yang telah Bapak berikan yang sangat membantu penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga tahap akhir. Semoga Bapak senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan, serta terus menjadi sosok yang menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
5. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. dan Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala kemudahan dan dukungan yang diberikan selama proses pengurusan persyaratan penelitian hingga terselesaikannya penelitian ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan setiap amanah dan tugas ke depannya.
6. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu, dedikasi, dan ketulusan dalam membimbing selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Semoga seluruh ilmu yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menjalani kehidupan di masa depan. Semoga pula segala ilmu dan pengabdian yang

diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

7. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi, mulai dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Mbak Wulan dan Mbak Uki yang dengan sabar dan sigap telah membantu dalam pengurusan berkas-berkas administrasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas arahan dan dukungan yang sangat berarti. Semoga staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Terkhusus saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada orangtua tercinta saya, Bapak Agung Ganef Kartika dan Ibu Agustina Siregar, atas segala pengorbanan dan usaha tanpa henti yang telah diberikan. Terima kasih atas kehadiran dan pendampingan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala kasih sayang yang selalu kalian berikan, serta semua pelajaran, motivasi, dan pengalaman berharga yang menjadi bekal hidupku. Terima kasih sudah selalu menemani baik di saat suka maupun duka, mendukung segala usaha dan impian yang aku jalani, serta senantiasa mengawali dan menyertai dengan doa yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi tempat aku mencurahkan segala keluh kesah selama pengerjaan skripsi ini, serta menjadi penopang utama ketika aku hampir merasa putus asa dalam menjalani penelitian. Terima kasih telah mempercayai bahwa aku mampu membanggakan Bapak dan Ibu, meski maaf aku belum selalu memenuhi harapan. Terima kasih atas kesabaran dalam mendidik dan membimbingku hingga aku berhasil menempuh jenjang sarjana. Doa-doa kalian yang tulus di setiap sujud selalu menjadi kekuatan bagiku. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan rezeki dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, serta diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang, agar kelak dapat menyaksikan aku sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat sebagai putri bungsu tersayang kalian. Terima kasih, Bapak dan Ibu.

9. Terkhusus saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bude Yuni Aprida Siregar dan Pakde Heryatman, atas segala bantuan tanpa henti yang telah diberikan dengan ikhlas demi terwujudnya cita-cita saya menjadi sarjana Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas kekuatan dan dukungan yang selalu menguatkan saya. Semoga Pakde dan Bude diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, serta dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT.
10. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Terima kasih atas informasi, masukan, saran, serta arahan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbagi pengetahuan telah sangat mempermudah saya dalam memperoleh data yang diperlukan. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.
11. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, khususnya kepada Ibu Parina, Bapak Jon, Ibu Wita, Ibu Rahma, Bapak Buyung, dan Bapak Andre, atas segala dukungan, semangat, serta pendampingan yang telah diberikan selama proses pengumpulan data penelitian saat masa magang. Kehadiran dan bantuan Bapak dan Ibu sangat berarti dalam memperlancar proses penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
12. Teruntuk sahabatku, Muhammad Shafwan Assalam dan Rizki Amelia Putri, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang senantiasa hadir dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan dalam berbagai momen, kehadiran kalian sebagai sahabat yang setia sangat berarti bagiku. Terima kasih, Shafwan dan Amel telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi, berbagi cerita, canda, dan tawa yang menjadi penguat di tengah proses yang penuh tantangan. Semoga di masa mendatang kita diberi kesempatan untuk kembali dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik.

13. Sahabat Seperjuanganku, Artasya Pinka Pangesty, terima kasih yang tulus aku sampaikan kepada Pinka sebagai sahabat yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, tempat berbagi cerita, canda, dan tawa, serta selalu hadir memberikan dukungan di saat-saat sulit maupun bahagia. Terima kasih atas kesediaan waktumu, atas semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya kamu berikan, khususnya ketika aku hampir menyerah dalam proses penelitian ini. Kehadiranmu menjadi penguat yang sangat berarti dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di masa depan dalam keadaan yang lebih baik. Sukses dan selalu bahagia untukmu, Pinka.
14. Vivi Aprisa, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Vivi, teman yang selalu hadir dengan kebaikan dan semangat positif. Terima kasih telah menjadi teman yang menyenangkan, menjadi tempat berbagi cerita, serta senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai situasi. Kehadiranmu yang mampu mencairkan suasana benar-benar menjadi penyemangat tersendiri. Terima kasih pula atas segala perhatian dan dukungan yang kamu tunjukkan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan teman yang setia dalam suka maupun duka. Semoga setiap langkahmu ke depan selalu dimudahkan dan dilimpahkan kebaikan oleh Allah SWT.
15. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada teman-teman tercinta, Fans Julianto, Shafwan, Amel, Agung, Muti, Pinka, Ijul, Bima, Silvi, C Dian, Fatoni, Vivi, dan There. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah perjalanan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka, atas semua cerita, tawa, dan kenangan indah yang telah kita lalui bersama, momen-momen yang akan selalu aku kenang dengan hangat. Terima kasih juga atas segala bantuan, kebersamaan, dan semangat yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi penguat dan penghibur di saat-saat sulit. Semoga kalian semua senantiasa diberi kelancaran dalam setiap urusan dan menjadi pribadi yang sukses di masa depan. Sampai bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Sukses selalu untuk kalian semua, orang-orang baik.

16. Teruntuk temanku, Velly, terima kasih sudah menjadi teman yang baik untukku. Terimakasih sudah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Sukses selalu untukmu vell.
17. Teruntuk Aca, Adel, Mba Nur, Mba Dila, Wulan, Elfani, Alin, Alghi, Naufal, dan Bang Iyok, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama proses penulisan skripsi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, canda, dan tawa yang menguatkan di tengah perjalanan ini. Semoga setiap langkah kalian senantiasa dimudahkan, diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan meraih kesuksesan di masa depan.
18. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara (2021) yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan perjuangan selama masa perkuliahan. Bersama kalian, saya melewati berbagai dinamika dunia kampus yang penuh warna. Terima kasih atas setiap pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam versi diri yang lebih baik, dan semoga Allah SWT senantiasa memudahkan setiap urusan kita kedepannya.
19. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada idolaku tercinta, *all of members* NCT yang telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah penulis. Di tengah lelah dan penat kehidupan, karya-karya kalian, senyuman tulus, serta pesan-pesan positif yang kalian sampaikan telah menjadi penguat dan penghibur yang berarti. Terima kasih telah menemani hari-hari penulis bahkan tanpa kalian sadari. Semoga cinta dan dukungan ini bisa terus tersampaikan, sebagaimana kalian yang telah memberi begitu banyak tanpa pamrih.
20. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lee Donghyuck Oppa yang telah menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam setiap langkah penulis. Kehadiran, karya-karya, dan ketulusanmu dalam berkarya telah menemani hari-hari penulis, menguatkan di saat lelah, dan menghibur di tengah kesepian. Meski jarak memisahkan, cintamu kepada para penggemar selalu terasa begitu dekat dan tulus. Terima kasih telah menjadi alasan senyum, inspirasi, dan bagian penting dari perjalanan penulis. Semoga Oppa selalu dikelilingi cinta dan kebahagiaan sebagaimana yang telah diberikan kepada penulis.

21. Terakhir, kepada diriku sendiri, terima kasih telah bertahan hingga titik ini. Perjalanan ini memang penuh tantangan, namun terima kasih ya sudah tetap melangkah meski dipenuhi keraguan dan luka. Terima kasih karena menghargai dan mensyukuri setiap usaha, keputusan, dan keberanian yang telah dipilih bahkan ketika dunia terasa berat. Terima kasih sudah belajar dari kegagalan, tidak menyerah dalam ketidakpastian, serta percaya bahwa diri ini layak berkembang. Terima kasih telah bekerja keras, bersabar menghadapi segala cobaan, dan tetap menjadi diriku sendiri. Terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab, tetap mengerjakan meski telah banyak meneteskan air mata, dan tekun merevisi meski kepala pusing. Aku bangga pada diriku yang begitu gigih dan tidak mudah menyerah. Semoga semangat ini terus memandu langkahku ke depan.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Tentang Konflik	11
2.3 Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Konflik	12
2.4 Tinjauan Tentang Manajemen Konflik	15
2.5 Tinjauan Tentang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).....	19
2.6 Kerangka Berpikir.....	23
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Sumber Data.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	29
3.7 Keabsahan Data	30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Perencanaan TPA Regional Provinsi Lampung	32
4.1.2 Gambaran Umum Wilayah Layanan TPA Regional Provinsi Lampung	33
4.1.3 Gambaran Umum Lokasi Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung	35
4.1.4 Hasil Penelitian Indikator Manajemen Konflik Stevenin (1997)	37
4.2 Pembahasan.....	66
4.2.1 Pengenalan	66
4.2.2 Diagnosa	71
4.2.3 Menyepakati Solusi.....	77
4.2.4 Pelaksanaan.....	82
4.2.5 Evaluasi.....	87
V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rencana Tahapan Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.....	4
2. Penelitian Terdahulu.....	8
3. Daftar Informan Penelitian.....	28
4. Daftar Dokumen Penelitian.....	29
5. Luas dan Kondisi Kependudukan Wilayah Perencanaan Tahun 2022	32
6. Jumlah timbulan Sampah Wilayah Perencanaan Tahun 2022.....	33
7. Wilayah Layanan TPA Regional Provinsi Lampung.....	34
8. Matriks Hasil Penelitian.....	64
9. Panduan Wawancara	103
10. Tabel Triangulasi	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Timbulan Sampah Provinsi Lampung 2019–2024	3
2. TPA Natar Bersistem Open Dumping	20
3. TPA Talang Gulo Jambi Bersistem Sanitary Landfill	21
4. TPAS Tanggan Sragen Jawa Tengah Bersistem Controlled Landfill	22
5. Kerangka Berpikir Penelitian	23
6. Proyeksi TPA Regional Provinsi Lampung	36
7. Kondisi Lahan TPA Regional Provinsi Lampung, 2025	36
8. Kondisi Jalan TPA Regional Provinsi Lampung, 2025	37
9. Laporan Akhir Masterplan TPA Regional	40
10. Laporan Akhir Feasibility Study Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung, 2023	42
11. Kondisi TPA Eksisting Natar, 2025	45
12. Kondisi Pemakaman Cina di Dekat TPA Eksisting, 2025	45
13. Pengenalan dari Alur Konflik Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung	47
14. Roadmap Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026	60
15. Lampiran Surat Izin Penelitian	101
16. Wawancara dengan Dede Sulaeman, S.T., M.T., selaku Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Muda Dinas PKPCK Provinsi Lampung	102
17. Wawancara dengan Achmad Jon Viktor, S.Hut.,MM., selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Lampung	102
18. Wawancara dengan Erni dan Rasiman selaku Masyarakat Desa Tanjung Sari, Natar	102
19. Wawancara dengan Wahyudi selaku Sekretaris Desa Tanjung Sari, Natar	102

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi perhatian utama dalam isu lingkungan di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), berbagai pendekatan baru mulai dikembangkan dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan (Lionardo & Kurniawan, 2021). Pendekatan baru ini memperkenalkan konsep bahwa sampah tidak hanya sekadar limbah yang perlu dibuang, melainkan sebagai sumber daya dengan potensi nilai ekonomi dan ekologis. Melalui pemilahan yang dilakukan di awal, sebagian besar sampah dapat didaur ulang atau diolah menjadi produk bernilai, seperti *eco enzyme* atau bahan bakar alternatif (*Refuse-Derived Fuel*) sehingga hanya residu yang berakhir di TPA (Kurniawan *et al.*, 2024).

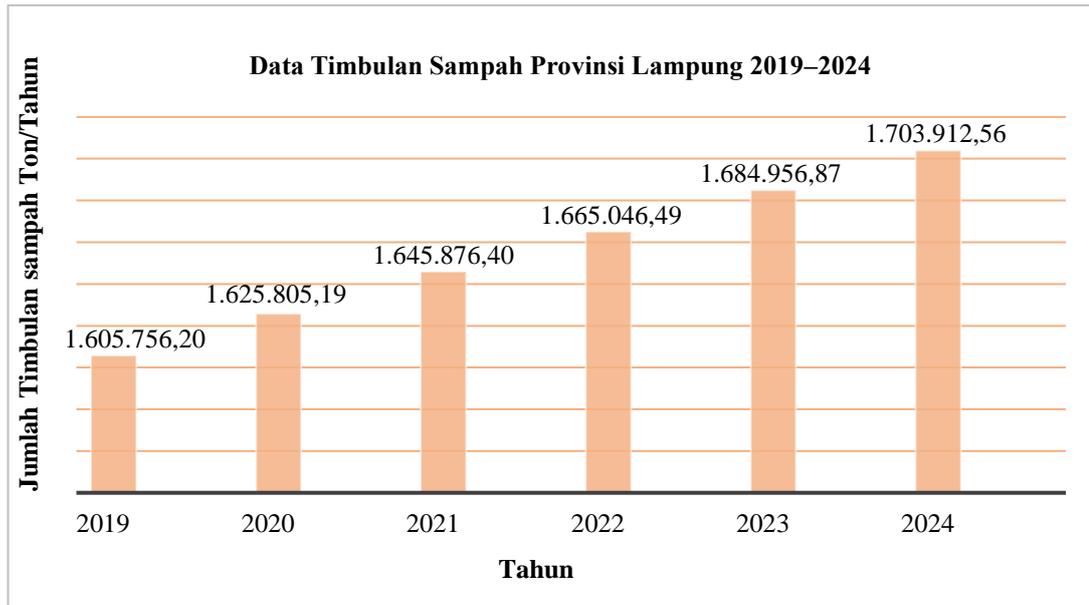
Penerapan metode pengelolaan sampah di TPA harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Th. 2008, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem *sanitary landfill* pada TPA yang dioperasikan. Dalam regulasi tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk merencanakan penutupan TPA dengan sistem pembuangan terbuka dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun serta menyelesaikan penutupan TPA yang menggunakan sistem tersebut dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang mulai berlaku.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi *sanitary landfill* untuk kota metropolitan dan kota besar, *controlled landfill* untuk kota sedang dan kota kecil, serta tidak dioperasikannya

TPA secara *open dumping*. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan meningkatkan pengelolaan TPA Regional. Hal ini didasari kenyataan bahwa kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh (Costa, 2018). Melalui kerjasama pengelolaan TPA antara kabupaten/kota akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dalam TPA Regional tentu tidak berhenti sampai pada tahap pembangunan semata, tetapi juga sampai pada tahap pengelolaan (operasi dan pemeliharaan) (Manurung *et al.*, 2016).

Penyiapan TPA Regional memerlukan kesiapan operasional dari setiap kabupaten/kota, terutama dalam hal pengangkutan sampah menuju TPA tersebut (Rizki, 2023). Batasan daya tampung TPA mengharuskan setiap daerah untuk merancang rencana pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Berdasarkan data pra-riset yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, pengelolaan sampah di Provinsi Lampung sendiri menghadapi sejumlah kendala seperti tingginya laju timbulan sampah, kurangnya pemisahan antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang berakibat belum optimalnya pemilahan di tingkat awal, rendahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya lahan untuk pengelolaan sampah terpadu, serta pengelolaan sampah yang belum menggunakan metode dan teknik yang komprehensif, berbasis lingkungan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2024, Provinsi Lampung memiliki luas wilayah sebesar 33.575,41 km² yang terbagi atas 13 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, sejak tahun 2020 hingga 2023, jumlah penduduk di Provinsi Lampung diproyeksikan mengalami peningkatan dari 8,98 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 9,31 juta jiwa pada tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk ini tercatat sebesar 1,21 persen per tahun selama periode tersebut. Jumlah penduduk yang besar ini tentunya memengaruhi volume timbulan sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, sehingga diperlukan ketersediaan lahan yang memadai untuk TPA sampah guna mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.



Gambar 1. Data Timbulan Sampah Provinsi Lampung 2019–2024

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2025)

Berdasarkan data di atas, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (2025) mencatat bahwa timbulan sampah di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan signifikan selama rentang waktu 2019–2024. Berdasarkan data tersebut, jumlah timbulan sampah meningkat dari 1.605.756,20 ton pada tahun 2019 menjadi 1.703.912,56 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perlunya upaya pengelolaan sampah yang lebih efektif. Pemerintah Provinsi Lampung menilai bahwa kebutuhan akan pengelolaan sampah secara regional sangat penting terutama terkait dengan TPA bagi ibukota provinsi dan kawasan sekitarnya (Laporan Akhir *Master Plan* TPA Regional Provinsi Lampung, 2022).

Provinsi Lampung telah merencanakan pembangunan TPA Regional dengan sistem yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 hingga 2029, di mana pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyek pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung bertujuan untuk mengelola sampah dari tiga

wilayah, yaitu Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan (Laporan Akhir Master Plan TPA Regional Provinsi Lampung, 2022).

Lokasi TPA Regional yang direncanakan terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas lahan mencapai 20 hektar tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung dan diperkirakan mampu menampung sampah sekitar 20 tahun kedepan (Laporan Akhir *Feasibility Study* TPA Regional Provinsi Lampung, 2023). Lokasi TPA Regional ini berdekatan dengan TPA Natar yang telah beroperasi sebelumnya, yang memiliki luas 2 hektar dengan sistem pengelolaan sampah berupa *Controlled Landfill*. Adapun jarak antara lokasi TPA dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah warga, dan lainnya sekitar 1 kilometer, sementara akses menuju lokasi dari jalan utama berjarak sekitar 6 kilometer (Laporan Akhir *Master Plan* TPA Regional Provinsi Lampung, 2022).

Rencana pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung yang dimulai sejak tahun 2019 mengalami berbagai hambatan dalam empat tahun terakhir, terutama akibat lambannya proses administratif di tingkat pemerintahan provinsi (Fernandi, 2023). Hal ini terlihat dari dokumen *masterplan* yang baru selesai pada tahun 2022 sebagai panduan strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan TPA Regional, serta dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) yang selesai disusun pada tahun 2023 dengan hasil bahwa, TPA Regional Provinsi Lampung layak dibangun pada lokasi yang direncanakan yaitu, di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1. Rencana Tahapan Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung

No.	Kegiatan	Ket.
1.	<i>Masterplan</i> Pembangunan TPA Regional	Selesai Th.2022: Panduan strategis dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan TPA Regional
2.	MoU Pembangunan TPA regional antar kabupaten/kota	Belum
3.	Penerbitan Pergub TPA Regional	Dalam Proses di Biro Hukum
4.	FS Pembangunan TPA regional	Selesai Th. 2023: Layak bangun di di Desa Tanjung Sari, Natar
5.	DED Pembangunan TPA regional	Belum
6.	Amdal Pembangunan TPA regional	Belum
7.	Pembangunan Fisik TPA regional	Belum

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan tabel di atas, meskipun tahapan awal seperti penyusunan *masterplan* dan studi kelayakan telah diselesaikan, sejumlah tahapan penting menuju pembangunan fisik TPA Regional Provinsi Lampung masih belum terlaksana. Salah satu yang paling krusial adalah belum adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berfungsi memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Hasil wawancara pra-riset peneliti dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa meskipun studi kelayakan telah menyatakan bahwa lokasi yang direncanakan memenuhi syarat untuk pembangunan, resistensi dari masyarakat setempat tetap menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek ini.

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset peneliti dengan Kepala Desa Tanjung Sari, penolakan pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh pengalaman dari keberadaan TPA sebelumnya, di mana TPA tersebut tidak dikelola dengan baik dan telah menimbulkan dampak negatif pada masyarakat setempat. Bahkan pada Desember 2024, TPA Tanjung Sari, Natar telah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akibat pengelolaan sampah yang dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan sistem *controlled landfill* yang berlaku. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran warga terhadap potensi dampak negatif dari pembangunan TPA Regional yang lebih besar di wilayah tersebut.

Kepala Desa Tanjung Sari, Prayit menjelaskan bahwa warga di sekitar akan terganggu oleh bau menyengat yang dihasilkan TPA, terutama selama musim kemarau. Selain itu, limpasan air limbah yang tercemar saat hujan berpotensi merusak kolam ikan dan lahan persawahan warga. Intensitas lalu lintas truk sampah di area tersebut juga turut merusak infrastruktur jalan lingkungan. Beliau menyampaikan bahwa penolakan ini telah disampaikan pada saat *focus group discussion (FGD)* dalam menyusun *masterplan* dan pemaparan studi kelayakan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung. Selain itu penolakan tersebut disampaikan kembali dalam sebuah acara Bimtek Pengelolaan Sampah di Natar yang diselenggarakan oleh Sudin, Ketua Komisi IV DPR RI pada awal Juli 2024. Kepala

Desa Tanjung Sari itu berharap bahwa pemerintah dapat mengkaji kembali terhadap rencana pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung di desanya.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, menunjukkan perlunya tindakan serius dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Konflik yang terjadi perlu segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi konflik yang destruktif, di mana setiap pihak akan mengalihkan fokus, tenaga, serta sumber daya dari peningkatan produktivitas ke tindakan yang bertujuan untuk melemahkan atau menghancurkan pihak lawan (Watungadha, 2020). Dalam hal ini, peneliti menilai manajemen konflik yang tepat diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi penanganan konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

Peneliti tertarik menggunakan perspektif manajemen konflik dengan judul **“Manajemen Konflik Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung”**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai situasi aktual, upaya pemecahan yang dilakukan dan dapat menjadi referensi serta panduan bagi provinsi lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penanganan konflik dalam pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisa mendalam terkait penanganan konflik pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung melalui manajemen konflik yang tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terkait dengan pengembangan kajian ilmu manajemen konflik, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis:

- 1) Manfaat untuk pemerintah, pemerintah daerah dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang kondisi aktual konflik yang terjadi. Pemahaman ini memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan lingkungan, sehingga dapat mempercepat penyelesaian konflik secara partisipatif dan meningkatkan kepercayaan publik.
- 2) Manfaat untuk akademisi, akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai studi kasus dalam pengajaran terkait manajemen dan resolusi konflik dengan memberikan contoh nyata kepada mahasiswa mengenai dinamika konflik antara pemerintah dan masyarakat. Akademisi juga dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk mengembangkan kurikulum atau program pengajaran yang lebih relevan terkait manajemen dan resolusi konflik.
- 3) Manfaat untuk umum/masyarakat, masyarakat umum akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konflik yang terjadi. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan TPA Regional dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memanfaatkan studi-studi sebelumnya sebagai salah satu acuan untuk memperkuat kerangka teoretis yang digunakan dalam analisis penelitian. Peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Berikut penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Urrahmi & Putri (2020) Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, Sumatera Barat	Fokus penelitian merujuk pada teori manajemen konflik yang dikemukakan oleh Stevenin (1997), penelitian ini menyelidiki tahap-tahap pengelolaan konflik yang dimulai dari: <ol style="list-style-type: none">1. Pengenalan;2. Diagnosis;3. Kesepakatan solusi;4. Pelaksanaan;5. Evaluasi.	Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahap pengenalan dianggap kurang efektif, mengakibatkan perbedaan pendapat mengenai harga tanah dan dampak pembangunan. Pada tahap diagnosis, konflik teridentifikasi akibat penilaian harga tanah yang rendah, masalah tanah ulayat, dan sertifikat ganda, serta ketidakpastian terkait ganti rugi. Selanjutnya, proses manajemen konflik berfokus pada kesepakatan solusi yang diakhiri dengan pelaksanaan dan evaluasi solusi yang diterapkan. Penelitian ini mencatat dampak positif, seperti peningkatan harga jual sayuran, serta dampak negatif terhadap perekonomian lokal dan akses jalan bagi pedagang. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya membangun hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah serta memastikan pembayaran ganti rugi untuk meredakan konflik dan memfasilitasi kehidupan masyarakat.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Fathurrohman & Kartini (2023) Manajemen Konflik Oleh Pemerintah Desa Dalam Kasus Penambangan Tanah Di Gunung Geulis Tahun 2019, Jawa Barat	Teori yang digunakan adalah teori Gaya Manajemen Konflik yang dipelopori oleh Schermerhon (1978), dengan mengidentifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran (<i>Avoidance</i>); 2. Akomodasi (<i>Accommodation</i>); 3. <i>Competition/Authoritative Command</i>; 4. Bekerjasama (<i>Compromise</i>); 5. <i>Collaboration/problem solving</i>. 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa cenderung menerapkan strategi penghindaran (<i>avoidance</i>) dalam menangani konflik. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghindari keterbukaan dengan tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Selain itu, terdapat sikap permisif yang ditunjukkan mengindikasikan gaya manajemen konflik <i>accommodation</i> , di mana aktivitas penambangan oleh perusahaan swasta diizinkan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum. Namun, tekanan dari aksi demonstrasi masyarakat mendorong untuk mengubah pendekatannya. Pada tahap ini, gaya manajemen konflik <i>compromise</i> mulai diterapkan, terlihat dari adanya negosiasi yang menghasilkan keputusan bersama yang mengedepankan keadilan dan pemulihan situasi. Strategi ini menekankan pada penyelesaian konflik secara kolaboratif demi menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
3.	Fauzan <i>et al.</i> (2023) Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Masyarakat Gampong Pande terhadap Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Lokasi Cagar Budaya	Fokus penelitian menggunakan indikator manajemen konflik dari Stevenin (1997) dalam menyelesaikannya yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan; 2. Diagnosis; 3. Menyepakati; 4. Pelaksanaan; dan 5. Evaluasi. 	Mencakup pertentangan terkait status cagar budaya, masalah perbatasan akibat kesalahan perizinan dan kekhawatiran dampak lingkungan. Komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah desa serta minimnya sosialisasi memperburuk situasi. Perbedaan tujuan pembangunan IPAL dan pelestarian cagar budaya semakin memperdalam konflik, upaya diskusi belum memuaskan kedua pihak. Masyarakat telah mengajukan penolakan melalui FORMASIGAPA dan menyurati Kementerian PUPR. Rekomendasi penyelesaian meliputi relokasi IPAL, pemulihan situs cagar budaya, dan pendaftaran ke UNESCO.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Fadhilah (2024) Konflik Kepentingan dalam Implementasi Pembangunan Wisata Religi di Desa Bogor, Jawa Tengah	Fokus penelitian menggunakan teori yang dipelopori oleh Coser (2003) yang menganalisis penyebab konflik dengan melihat apakah konflik tersebut: 1. Konflik realistik, muncul karena adanya ketidakpuasan individu atau kelompok masyarakat; atau 2. Konflik Non-realistik yang melibatkan perjuangan untuk pengakuan, ekspresi nilai, atau realisasi identitas.	Konflik dalam pembangunan wisata religi di Desa Bogor disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah desa yang tidak merespons aspirasi terkait pengembangan wisata. Masyarakat memutuskan untuk membangun secara mandiri tanpa melibatkan pemerintah desa, dengan tujuan utama meningkatkan ekonomi lokal dan melestarikan situs leluhur. Konflik ini kemudian diselesaikan melalui musyawarah, namun pembangunan tetap dilaksanakan oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah desa.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan dari empat penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah sebagai aktor utama dalam konflik, yang kemudian dianalisis guna menghasilkan tindakan penyelesaian atau resolusi konflik yang dapat memperbaiki hubungan antara kedua pihak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana dinamika konflik antara masyarakat dan pemerintah menjadi isu yang diangkat.

Konsep dan teori yang digunakan juga menjadi persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu teori yang dipelopori oleh Stevenin (1997). Alasan peneliti memilih teori ini sebagai dasar penelitian adalah, karena Stevenin menawarkan lima langkah yang jelas dan sistematis dalam manajemen konflik, yaitu pengenalan, diagnosis, menyepakati solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik yang sedang diteliti.

Selanjutnya, perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian. Peneliti mengambil lokasi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, di mana memiliki karakteristik konflik dengan tingkat urgensi yang berbeda dan juga karakteristik daerah dengan aspek geografis, sosial, dan kebijakan lokal yang berbeda. Penelitian ini akan menekankan pada perumusan rekomendasi

penyelesaian konflik dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Pembangunan tidak terlepas dari dinamika konflik karena perubahan yang ditimbulkannya memengaruhi struktur sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda (Fathurrohman & Kartini, 2023). Perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat mengenai arah dan dampak pembangunan sering kali memunculkan potensi konflik. Namun, dalam konteks pembangunan, konflik tidak selalu memiliki dampak negatif, melalui manajemen konflik yang tepat, konflik dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperbaiki kebijakan, memperkuat legitimasi, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan (Fauzan *et al.*, 2023).

2.2 Tinjauan Tentang Konflik

Konflik dalam pembangunan adalah fenomena yang sering muncul, terutama ketika melibatkan kepentingan, keinginan, dan tujuan yang beragam dari berbagai pihak. Seperti halnya pemerintah dan masyarakat lokal yang kerap menimbulkan ketidaksepahaman (Latif, 2024). Konflik ini menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan dan bahkan sulit untuk dihindari sepenuhnya. Secara umum, konflik didefinisikan sebagai perselisihan atau pertentangan antara dua kekuatan, baik individu maupun kelompok, di mana masing-masing pihak memiliki keinginan untuk saling menyingkirkan, menyalahkan, atau membenarkan tindakannya sendiri (Nafis, 2020).

Istilah "konflik" berasal dari bahasa latin *confligere, conflictum* yang berarti saling berbenturan, mencakup ketidaksesuaian, pertentangan, oposisi, dan interaksi antagonis (Kusworo, 2019). Konflik merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam interaksi sosial antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks kehidupan manusia dan masyarakat, konflik sering kali tidak terpisahkan, sehingga sulit membayangkan kehidupan tanpa kehadiran konflik. Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi terkait konflik. Stevenin (1997) dalam bukunya mendefinisikan Konflik sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu

maupun kelompok, yang memiliki perbedaan dalam tujuan atau kepentingan. Konflik muncul sebagai akibat dari ketidaksepahaman atau perbedaan pandangan, nilai, maupun sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Coser dalam Bima (2015) mendefinisikan konflik sebagai proses instrumental yang berperan dalam pembentukan, integrasi, dan pemeliharaan struktur sosial. Coser mengemukakan bahwa konflik muncul akibat perbedaan kepentingan atau keyakinan di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan dan tidak dapat dicapai secara bersamaan. Scermerhon dalam Fathurrohman & Kartini (2023), menjelaskan bahwa konflik muncul ketika terdapat ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat terkait isu-isu substantif atau ketika konflik emosional memicu ketegangan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dapat bersifat rasional maupun emosional, tergantung pada konteks interaksi yang terjadi.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu proses interaksi atau situasi yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang ditandai dengan adanya perbedaan atau pertentangan dalam nilai, tujuan, pandangan, atau kepentingan. Konflik dapat mengganggu hubungan antar pihak, memicu stres, dan menghambat pencapaian tujuan, terutama ketika berkaitan dengan alokasi sumber daya ataupun persepsi.

2.3 Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Konflik

Coser dalam Fadhilah (2024), menjelaskan bahwa jenis konflik dibedakan menjadi konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik muncul dari kekecewaan terhadap sistem atau perbedaan kepentingan yang konkret, seperti pemogokan atau demonstrasi. Sementara itu, konflik non-realistik lebih bertujuan meredakan ketegangan, seperti pembalasan dendam atau pencarian "kambing hitam". Coser menekankan bahwa kedua jenis konflik ini memiliki dampak yang berbeda dalam dinamika sosial, yang mana dapat berdampak positif jika dilakukan pengelolaan dan penyelesaian yang tepat serta berdampak negatif jika pengelolaan dan penyelesaiannya tidak tepat.

Menurut Schermerhorn dalam Fathurrohman & Kartini (2023), konflik dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan karakteristik dan konteksnya. Konflik substantif terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat atau sudut pandang terkait isu-isu penting, seperti kebijakan atau alokasi sumber daya. Konflik afektif timbul dari benturan kepribadian atau kesulitan interpersonal, yang memicu emosi negatif seperti kemarahan atau frustrasi antara individu yang terlibat. Konflik proses muncul akibat perbedaan pandangan mengenai cara kelompok beroperasi, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Schermerhorn juga menekankan bahwa konflik dapat berdampak positif atau negatif, tergantung pada bagaimana pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan.

Selanjutnya, menurut Stevenin (1997), terdapat berbagai jenis konflik yang dapat ditemukan dalam organisasi maupun interaksi sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik Intrapersonal

Konflik ini terjadi dalam diri individu ketika seseorang dihadapkan pada pertentangan antara dua atau lebih keinginan, nilai, atau prioritas yang saling bertentangan. Biasanya, konflik intrapersonal timbul ketika individu harus membuat keputusan penting yang melibatkan pilihan yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuan mereka yang lain. Dampak dari konflik intrapersonal dapat berupa stres emosional atau kebingungannya individu dalam membuat keputusan yang tepat.

2. Konflik Interpersonal

Konflik ini melibatkan dua individu yang memiliki perbedaan dalam hal tujuan, nilai, atau kepentingan. Biasanya, konflik interpersonal disebabkan oleh perbedaan perspektif, komunikasi yang buruk, atau ketidaksepakatan mengenai cara mencapai tujuan bersama. Konflik jenis ini sering terjadi dalam hubungan pribadi atau profesional dan dapat mengarah pada ketegangan emosional jika tidak dikelola dengan baik.

3. Konflik Antar Individu dan Kelompok

Konflik ini muncul ketika individu merasa tertekan atau dihadapkan dengan perbedaan pandangan atau kepentingan antara dirinya dan kelompok tempat ia berada, atau sebaliknya. Biasanya, konflik ini terjadi ketika individu merasa bahwa

kepentingannya bertentangan dengan tujuan kelompok atau norma-norma yang ada dalam kelompok tersebut.

4. Konflik Antar Kelompok

Konflik ini terjadi antara dua atau lebih kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik ini sering terjadi dalam konteks sosial, seperti ketika sekelompok warga menentang kebijakan atau keputusan pemerintah yang dianggap merugikan mereka, misalnya terkait dengan alokasi sumber daya, kebijakan pembangunan, atau regulasi tertentu.

5. Konflik Antar Organisasi

Konflik jenis ini muncul antara organisasi yang berbeda, seperti perusahaan yang saling bersaing di pasar. Konflik antar organisasi sering kali disebabkan oleh persaingan untuk merebut pasar, klien, atau sumber daya lainnya yang dapat menguntungkan bagi salah satu pihak. Meskipun konflik antar organisasi dapat merugikan pihak yang terlibat, dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan untuk memenangkan persaingan.

Stevenin juga menekankan bahwa meskipun konflik sering dianggap sebagai hal negatif, sebenarnya dapat memiliki dampak positif apabila dikelola dengan baik. Pengelolaan konflik yang efektif dapat mendorong kreativitas, meningkatkan komunikasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. Sebaliknya, jika konflik dibiarkan tidak terselesaikan atau dikelola dengan buruk, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, stres, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis konflik di atas dapat disimpulkan bahwa, konflik dapat dibedakan menjadi berbagai jenis berdasarkan perspektif para ahli. Semua jenis konflik ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang tepat sangat penting untuk menghindari dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif yang dapat ditimbulkan.

2.4 Tinjauan Tentang Manajemen Konflik

Manajemen konflik pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari situasi konflik yang dianggap merusak dan melemahkan tujuan organisasi. Manajemen konflik tidak hanya berfokus pada penanganan konflik, tetapi juga menekankan pengelolaan konflik melalui pendekatan kompetitif maupun kooperatif (Sumita, 2020). Dalam hal ini, manajemen konflik berfungsi sebagai langkah awal yang penting dalam proses resolusi konflik. Melalui pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik didorong untuk bekerja sama, bahkan ketika konflik masih berlangsung dengan tujuan membuka ruang untuk dialog dan pencarian solusi yang lebih konstruktif. Manajemen konflik berperan dalam menciptakan perdamaian awal yang kemudian disempurnakan oleh proses resolusi konflik untuk melengkapi langkah-langkah awal yang telah diambil (Kurnia, 2022).

Manajemen konflik menurut Schermerhorn dalam Muchsin & Hambali (2017), mendefinisikan manajemen konflik sebagai suatu proses yang melibatkan rangkaian tindakan dan reaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dengan tujuan untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada bagaimana cara mengelola perbedaan yang ada secara efektif untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar. Berikut merupakan gaya manajemen konflik dari Schermerhorn (Fathurrohman & Kartini, 2023):

1. Penghindaran (*Avoidance*): Menghindari konflik dengan menarik diri dan tidak terlibat dalam konsekuensi apapun. Biasanya muncul ketika pihak merasa diperlakukan tidak adil atau diskriminatif, dan keluhannya diabaikan.
2. Akomodasi (*Accommodation*): Bersikap permisif dengan mengabaikan perbedaan untuk menjaga kerja sama, memungkinkan pihak lain memenuhi keinginannya tanpa paksaan.
3. Kompetisi/Perintah Berwenang (*Competition/Authoritative Command*): Menggunakan kekuatan otoritas untuk memaksakan solusi, di mana satu pihak menang dan pihak lainnya kalah, sering kali dengan ancaman atau intimidasi.

4. Kompromi (*Compromise*): Mencapai kesepakatan dengan bekerja sama untuk menemukan jalan tengah, sering melibatkan tawar-menawar di mana kedua belah pihak menerima keuntungan atau kerugian yang seimbang.
5. Kolaborasi/Penyelesaian Masalah (*Collaboration/Problem Solving*): Melibatkan semua pihak dalam pencarian solusi yang memenuhi kebutuhan masing-masing dengan prosedur yang lebih partisipatif, sering melalui mediasi atau negosiasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan manajemen konflik menurut Schermerhorn menekankan fleksibilitas melalui lima gaya utama, yaitu *avoidance*, *accommodation*, *competition*, *compromise*, dan *collaboration*. Kelebihan pendekatan ini terletak pada keberagaman gaya manajemen konflik yang ditawarkan, tetapi kelemahannya memerlukan pelengkap berupa analisis mendalam terhadap akar konflik untuk memastikan pengelolaan yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, Menurut Coser dalam Bima (2015), manajemen konflik merupakan upaya untuk memahami, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang merupakan bagian penting dari struktur sosial. Konflik ini muncul akibat perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, serta distribusi kekuasaan yang tidak merata. Coser menekankan bahwa konflik tidak hanya menciptakan ketegangan tetapi juga memiliki potensi untuk membawa perubahan sosial jika dikelola dengan baik. Adapun pendekatan Coser terhadap manajemen konflik melibatkan beberapa langkah (Bima, 2015), yaitu:

1. Menemukan Kepentingan Masing-Masing Aktor: Mengidentifikasi kepentingan yang mendasari konflik, baik itu kepentingan material maupun simbolis. Pemahaman ini penting untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pihak yang terlibat.
2. Mendeskripsikan Faktor Penyebab dan Bentuk Konflik: Analisis terhadap penyebab konflik dilakukan untuk menentukan apakah konflik bersifat realistik atau non-realistik. Konflik realistik, muncul karena adanya ketidakpuasan individu atau kelompok masyarakat, sedangkan konflik non-realistik melibatkan perjuangan untuk pengakuan, ekspresi nilai, atau realisasi identitas.

3. Penyelesaian Konflik: Penyelesaian konflik dirancang dengan mempertimbangkan jenis konflik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan manajemen konflik menurut Coser adalah, konflik dipandang tidak hanya sebagai sumber ketegangan tetapi juga sebagai peluang untuk mendorong perubahan sosial jika dikelola dengan baik. Pendekatan ini mengedepankan langkah-langkah seperti mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, mendeskripsikan penyebab dan bentuk konflik, serta menyesuaikan penyelesaiannya dengan jenis konflik. Kelebihan utama pendekatan ini adalah penekanannya pada analisis mendalam terhadap penyebab konflik dan pengakuan akan potensi positif konflik dalam mendorong perubahan sosial. Adapun kelemahan pendekatan ini terletak pada kurangnya panduan konkret untuk langkah-langkah penyelesaian konflik, sehingga sulit diterapkan dalam konteks yang membutuhkan solusi cepat dan efisien.

Stevenin (1997) mendefinisikan manajemen konflik sebagai suatu pendekatan sistematis untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik dalam berbagai konteks, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Proses ini melibatkan serangkaian aksi dan reaksi yang bertujuan untuk mengendalikan serta menyelesaikan perselisihan secara konstruktif. Stevenin menekankan pentingnya komunikasi yang efektif sebagai dasar untuk memahami konflik dan menghindari kesalahpahaman, serta penerapan strategi yang tepat seperti negosiasi atau kolaborasi untuk mencapai resolusi yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen konflik tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada peningkatan hubungan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini merupakan lima langkah yang diusulkan Stevenin untuk meraih kedamaian dalam situasi konflik, yaitu:

1. Pengenalan: Melakukan pemetaan awal atas permasalahan dan faktor yang memicu ketegangan antar pihak yang berkonflik, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan, guna memahami apa saja yang memerlukan perbaikan atau intervensi.
2. Diagnosis: Analisis terhadap situasi konflik dengan menggunakan pendekatan 5W+1H (*What, Why, When, Where, Who, dan How*), yang bertujuan untuk mengungkap akar masalah dan dinamika konflik.

3. Menyetujui Solusi: Mengumpulkan pandangan dari semua pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama, sekaligus mengevaluasi opsi-opsi penyelesaian yang tidak realistis atau tidak praktis.
4. Pelaksanaan: Penerapan solusi dengan mempertimbangkan secara cermat manfaat dari setiap tindakan yang diambil.
5. Evaluasi: Menilai keberhasilan penyelesaian konflik. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, proses evaluasi digunakan sebagai dasar untuk kembali ke tahapan sebelumnya dan mencoba alternatif lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan manajemen konflik menurut Stevenin menawarkan kerangka sistematis untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik melalui lima langkah utama yaitu, pengenalan, diagnosis, menyetujui solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Kelebihan utama pendekatan ini adalah panduannya yang terstruktur dan fleksibel mencakup analisis mendalam, pemahaman bersama, serta ruang untuk perbaikan berkelanjutan. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan komunikasi semua pihak yang terlibat. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk mengungkapkan pandangannya secara jelas dapat menghambat proses penyelesaian konflik, sehingga langkah-langkah sistematis tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan para ahli dari manajemen konflik di atas, peneliti memilih teori manajemen konflik yang dipelopori oleh Stevenin (1997). Pemilihan teori Stevenin dalam penelitian ini dibandingkan teori Schermerhorn dan teori Coser didasarkan pada keunggulan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti. Alasan peneliti memilih menggunakan teori Stevenin (1997) adalah, karena menekankan pada pendekatan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi solusi. Pendekatan ini cocok untuk peneliti yang membutuhkan kerangka kerja metodologis terstruktur untuk menganalisis manajemen konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung secara komprehensif. Teori Stevenin juga bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga dapat disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik konflik yang diteliti oleh peneliti.

Selain itu, manajemen konflik yang dipelopori oleh Stevenin (1997) berfokus pada komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara pihak-pihak terlibat, memungkinkan peneliti mengeksplorasi bagaimana dialog dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik. Sedangkan teori Schermerhorn dalam Fathurrohman & Kartini (2023) lebih terfokus pada gaya manajemen konflik yang cenderung lebih reaktif, sehingga sulit bagi peneliti untuk memahami akar masalah secara menyeluruh atau yang melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, di mana hal ini kurang cocok untuk konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung yang membutuhkan kolaborasi jangka panjang. Di sisi lain, teori Coser dalam Fadhilah (2024) lebih berfokus pada analisis penyebab konflik dan kurang menekankan pada solusi konkret atau langkah-langkah operasional dalam manajemen konflik, sehingga tidak cocok untuk peneliti yang ingin merekomendasikan penyelesaian konflik dengan memperbaiki hubungan dan kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

2.5 Tinjauan Tentang Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2008, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) didefinisikan sebagai fasilitas yang dirancang untuk mengelola dan mengolah sampah guna mengembalikannya ke media lingkungan secara aman, dengan mempertimbangkan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan pengelolaannya, terdapat 3 sistem pembuangan akhir sampah, yaitu:

1. Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*)

Pembuangan terbuka atau *open dumping* di TPA merupakan metode pengelolaan sampah yang dilakukan dengan membuang sampah secara langsung ke area pembuangan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dalam sistem ini, sampah ditumpuk di atas permukaan tanah dan dibiarkan menumpuk hingga volume yang cukup besar tanpa adanya upaya pengolahan atau pemrosesan lebih lanjut seperti pemilahan atau daur ulang. *Open dumping* sering kali menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta potensi penyebaran

penyakit. Selain itu, sistem ini juga kurang efisien dalam mengurangi volume sampah dan mengelola sampah organik maupun anorganik secara terpisah. Oleh karena itu, meskipun biaya operasionalnya cenderung lebih murah, penggunaan *open dumping* sering dianggap sebagai solusi yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Berikut merupakan TPA eksisting Natar yang menggunakan sistem pembuangan *open dumping*.



Gambar 2. TPA Natar Bersistem *Open Dumping*

Sumber: Hasil observasi peneliti, 2025

2. Pengurukkan (*Sanitary Landfill*)

Sistem pengelolaan sampah dengan metode pengurukkan (*sanitary landfill*) merupakan salah satu teknik pembuangan sampah yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan *open dumping*. Dalam sistem ini, sampah yang telah dipilih dan dipilah terlebih dahulu akan dibuang ke dalam lahan yang telah disiapkan dengan lapisan penahan yang terdiri dari tanah. Sampah ditumpuk dalam lapisan-lapisan yang diratakan dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan lapisan tanah setiap beberapa hari untuk mengurangi dampak polusi dan mempercepat proses dekomposisi.

Sanitary landfill dirancang dengan mempertimbangkan aspek pengendalian pencemaran, seperti pencegahan kebocoran cairan sampah yang bisa mencemari sumber air tanah (*leachate*), serta pengendalian gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah organik. Oleh karena itu, area pengurukkan dilengkapi dengan sistem pemantauan *leachate*, dan pengumpulan gas metana untuk dimanfaatkan sebagai energi atau dibakar secara aman. Dengan demikian, sistem ini lebih efektif dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan *open dumping* meskipun tetap memerlukan pengelolaan yang

hati-hati dan biaya operasional yang lebih tinggi. Berikut merupakan contoh dari TPA yang menggunakan sistem *sanitary landfill*.



Gambar 3. TPA Talang Gulo Jambi Bersistem *Sanitary Landfill*

Sumber: Kompas.com, 2022

3. Pembuangan Terkendali (*Controlled Landfill*)

Sistem pengelolaan sampah dengan metode pembuangan terkendali (*controlled landfill*) merupakan bentuk pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan terkontrol dibandingkan dengan *open dumping*, namun tidak sekompleks sistem *sanitary landfill*. Pada sistem ini, sampah dibuang ke dalam lahan yang sudah disiapkan dengan cara yang terorganisir, meskipun tidak selalu dilengkapi dengan sistem pengolahan gas yang seketat pada *sanitary landfill*. Pembuangan sampah dilakukan dengan pemadatan dan penutupan secara periodik menggunakan lapisan tanah atau bahan lain yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran bau dan mencegah penyebaran sampah ke area sekitar.

Sistem *controlled landfill* bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dengan mengatur pembuangan dan penimbunan sampah secara lebih terencana. Meskipun tidak memiliki fasilitas pemrosesan canggih seperti pada *sanitary landfill*, sistem ini biasanya mencakup kontrol terhadap pengolahan air lindi (*leachate*) untuk mencegah pencemaran air tanah dan pengelolaan gas metana yang dihasilkan selama dekomposisi sampah. Dengan demikian, meskipun kontrolnya lebih terbatas, sistem *controlled landfill* memberikan solusi yang lebih terkelola dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan *open dumping*, namun tetap memerlukan perhatian dalam pengelolaan jangka panjang. Berikut merupakan contoh dari TPA yang menggunakan sistem *controlled landfill*.



Gambar 4. TPAS Tanggan Sragen Jawa Tengah Bersistem *Controlled Landfill*

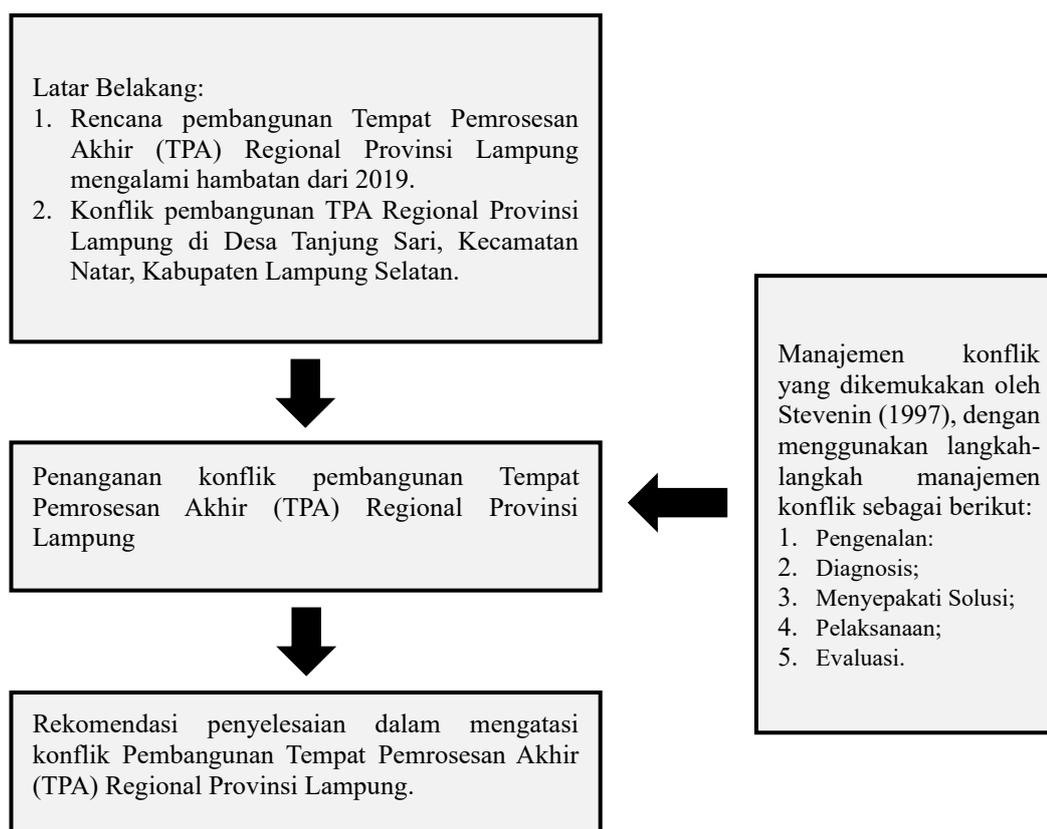
Sumber: Jatengnews.id, 2024

Berdasarkan penjelasan mengenai tiga sistem pengelolaan sampah TPA di atas, penerapan metode pengelolaan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006. Di mana undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk secara bertahap menghentikan operasional TPA dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) yang selama ini dianggap sebagai metode pengelolaan sampah paling merusak lingkungan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk merencanakan penutupan TPA *open dumping* dalam waktu maksimal satu tahun sejak undang-undang mulai berlaku, serta menyelesaikan penutupan tersebut dalam jangka waktu paling lama lima tahun.

Sebagai solusi dari penutupan TPA *open dumping*, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem *sanitary landfill*, terutama di wilayah metropolitan dan kota besar yang menghasilkan volume sampah dalam jumlah besar. Selanjutnya, sistem *controlled landfill* juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan sistem pengelolaan *open dumping* di TPA. Secara keseluruhan, penerapan kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA agar lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan risiko pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2.6 Kerangka Berpikir

Tahap selanjutnya yaitu peneliti membuat kerangka berpikir yang memiliki hubungan dengan fenomena penelitian pada konflik pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung. Peneliti menggunakan manajemen konflik yang dipelopori oleh Stevenin (1997). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berpikir di bawah ini:



Gambar 5. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena dapat membantu memahami konflik yang terjadi dalam pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Provinsi Lampung di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilakukan tanpa melibatkan perhitungan matematis melainkan lebih berfokus pada proses observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami secara menyeluruh suatu fenomena yang dialami oleh objek penelitian dalam konteks khusus dan alamiah dengan menggunakan metode ilmiah (Rijal, 2021). Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang terjadi melalui pengumpulan data yang komprehensif. Dengan demikian, kelengkapan dan kedalaman data yang diperoleh menjadi aspek esensial dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif manajemen konflik teori Stevenin (1997) dengan fokus pada lima langkah yang ditawarkan Stevenin dalam manajemen konflik, yaitu pengenalan, diagnosis, menyepakati solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk merekomendasikan penyelesaian konflik dengan memperbaiki hubungan dan kerja sama di antara pihak-pihak yang terlibat konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung. Dalam hal ini, teori manajemen konflik yang dipelopori oleh Stevenin (1997) menjadi landasan analisis yang

penting bagi peneliti. Berikut merupakan lima langkah manajemen konflik Stevenin (1997):

1. Pengenalan

mendapatkan pemetaan awal atas permasalahan dan faktor yang memicu ketegangan antar pihak yang berkonflik, sekaligus teridentifikasinya kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, yaitu antara keadaan atau situasi yang sedang berlangsung, baik dalam hal kebijakan, kinerja operasional, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari TPA eksisting Natar dengan gambaran ideal atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

2. Diagnosis

Mendapatkan analisa mendalam terkait akar masalah dan dinamika konflik. Analisis konflik dilakukan dengan pendekatan 5W+1H:

- a) *What*: Masalah atau penyebab utama yang memicu konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung, yaitu kekhawatiran warga terhadap potensi dampak lingkungan dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan sistem pengelolaan sampah yang berlaku.
- b) *Why*: Konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung muncul karena kurangnya komunikasi dan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.
- c) *When*: Teridentifikasi momen-momen kunci yang memicu eskalasi konflik.
- d) *Where*: Berfokus pada area sekitar yang terdampak langsung oleh pembangunan TPA.
- e) *Who*: Pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung, yaitu pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah desa, dan masyarakat.
- f) *How*: Respon dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu ada atau tidaknya solusi yang telah dicoba sebelumnya.

3. Menyepakati Solusi

Mendapatkan solusi melalui pendapat dari semua pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan dari solusi terkait pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

5. Evaluasi

Menilai keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan dalam konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di TPA Regional Provinsi Lampung, di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai persepsi dan sikap masyarakat Desa Tanjung Sari terhadap proyek pembangunan tersebut. Selanjutnya, bertempat di Pemerintahan Provinsi Lampung dengan mengambil data pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung dan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung, karena berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung serta dalam koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Peneliti dapat memahami bagaimana pemerintah provinsi mengupayakan sinergi antara kebutuhan pengelolaan sampah regional dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berupa hasil dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi laporan-laporan terkait. Sumber data utama dalam penelitian merupakan kata-kata yang kemudian diperkuat dengan beberapa foto dan dokumen lainnya (Alaslan, 2021). Jenis dan sumber data pada penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Peneliti menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk data yang didapatkan pada penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan penelitian yang ada kaitannya dengan rencana pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung. Selanjutnya, untuk data observasi, peneliti mengunjungi tempat pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung yang telah ditetapkan yaitu di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Terakhir, untuk data dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen-dokumen terkait pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti berasal dari artikel, jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen terkait pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung, dan internet. Tujuan penggunaan data sekunder ini adalah untuk menambah informasi terkait masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif yang mencakup penghimpunan data dalam bentuk pernyataan dan kata-kata. Di mana dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang diteliti dan juga ketika peneliti ingin mengetahui berbagai hal dari penelitiannya. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa informan antara lain:

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Informasi yang didapat
1.	Achmad Jon Viktor, S.Hut., MM. (Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)	Lima langkah manajemen konflik yang dikemukakan Stevenin (1997)
2.	Dede Sulaeman, S.T., M.T. (Jabatan fungsional teknik penyehatan lingkungan muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)	Lima langkah manajemen konflik yang dikemukakan Stevenin (1997)
3.	Wahyudi (Sekretaris Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)	Lima langkah manajemen konflik yang dikemukakan Stevenin (1997)
4.	Erni (Masyarakat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)	Lima langkah manajemen konflik yang dikemukakan Stevenin (1997)
5.	Rasiman (Masyarakat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)	Lima langkah manajemen konflik yang dikemukakan Stevenin (1997)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

2. Observasi

Observasi dilakukan peneliti di TPA Regional Provinsi Lampung yang bertempat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Melalui observasi ini, peneliti memahami dinamika konflik secara langsung pada kondisi yang terjadi di lapangan dan memahami perspektif dari masyarakat setempat terkait fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen berisi data yang memiliki relevansi dengan penelitian sehingga memperkuat dan memperkaya analisis penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan dokumen-dokumen yang digunakan oleh peneliti:

Tabel 4. Daftar Dokumen Penelitian

No	Dokumen	Data yang didapat
1.	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Dasar Hukum Pembangunan TPA Regional
2.	<i>Master Plan</i> TPA Regional Provinsi Lampung, 2022	Informasi terkait perencanaan pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung
3.	<i>Feasibility Study</i> TPA Regional Provinsi Lampung, 2023	Informasi terkait studi kelayakan lokasi keberadaan TPA Regional Provinsi Lampung
4.	<i>Road Map</i> Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung tahun 2025–2026	Informasi terkait strategi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung

Sumber: Dioalah oleh peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang merupakan proses sistematis dalam mengorganisasikan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data tersebut dengan mudah diinterpretasikan dan dipahami oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2014) dengan melibatkan aktivitas utama yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berinteraksi yaitu:

1. Tahap pertama adalah pengumpulan data yang mencakup seluruh aktivitas untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan penelitian, observasi di tempat pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung, dan Dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.
2. Tahap kedua adalah reduksi data yang melibatkan proses seleksi, pemilahan, fokus, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang diperoleh peneliti dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen terkait.

3. Tahap ketiga adalah penyajian data di mana informasi disusun secara terstruktur untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menguraikan data dalam bentuk narasi yang disesuaikan dengan fokus penelitian.
4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan di mana hasil analisis data diolah untuk memperoleh kesimpulan yang bermakna. Kesimpulan ini dirumuskan melalui analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, kemudian diuraikan dalam teks naratif yang menggambarkan manajemen konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memenuhi kriteria ilmiah dan dapat memverifikasi kebenaran serta keaslian data yang diperoleh (Alaslan, 2021). Pada penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup pengujian *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Berikut merupakan penjelasan dari uji keabsahan data (Hardani *et al.*, 2020):

1. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini bertujuan memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan mengandung kebenaran, sehingga hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca kritis dan diakui keabsahannya oleh para informan yang menjadi sumber informasi selama proses pengumpulan data. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik seperti peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan menggunakan bahan referensi.

a) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan, observasi dilakukan di TPA Regional Provinsi

Lampung, dan dokumentasi meliputi dokumen-dokumen terkait pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

b) Kecukupan Referensi

Peneliti menggunakan bahan referensi berupa artikel, jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, dokumen-dokumen terkait pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung, dan informasi-informasi dari internet.

2. Pengujian Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian untuk diterapkan atau dialihkan ke situasi atau konteks lain di luar lingkungan penelitian awal. Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas mengindikasikan sejauh mana temuan dan kesimpulan penelitian memiliki relevansi serta dapat digunakan secara umum pada populasi atau kondisi serupa namun berada dalam konteks yang berbeda. Melalui teknik ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara teliti dan cermat dengan menggambarkan secara mendalam konteks lokasi penelitian sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Deskripsi yang rinci ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

3. Pengujian Dependabilitas (*Dependability*)

Uji *dependability* bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan proses penelitian agar dapat dipastikan keandalannya. Proses ini dilakukan melalui audit oleh pihak independen atau pembimbing yang menilai apakah seluruh tahapan penelitian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur.

4. Pengujian Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* dilakukan untuk menilai apakah hasil penelitian merupakan refleksi dari proses penelitian yang dilakukan. Penelitian yang memenuhi standar *confirmability* memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan karena konsisten dengan langkah-langkah penelitian yang telah diambil. Pengujian ini biasanya dilakukan melalui ujian skripsi oleh tim penguji yang terdiri dari tiga dosen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung melalui manajemen konflik yang dipelopori oleh Stevenin (1997) adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan

Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung telah mempertimbangkan kelayakan teknis dan administratif dalam pemilihan lokasi, namun tetap menghadapi penolakan dari masyarakat setempat karena pengalaman negatif terhadap pengelolaan TPA sebelumnya.

2. Diagnosa

Konflik timbul karena ketidakpercayaan masyarakat yang memandang bahwa pemerintah gagal dalam pengelolaan TPA eksisting, sehingga muncul kekhawatiran bahwa proyek baru justru akan memperburuk kondisi yang ada. Situasi ini semakin rumit akibat adanya aspek sosial-ekonomi, terutama yang menyangkut keberlangsungan hidup para pemulung yang belum ditangani secara optimal.

3. Menyepakati Solusi

Pendekatan partisipatif yang mencakup komunikasi terbuka, pemberian kompensasi sosial-ekonomi, dan koordinasi antar lembaga menjadi langkah strategis dalam meredam konflik. Selain itu, penerapan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan penyusunan dokumen AMDAL turut memperkuat upaya penyelesaian konflik dan mendukung keberhasilan proyek pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan solusi bergantung pada koordinasi yang jelas antar pemangku kepentingan, keterlibatan aktif masyarakat terdampak, komunikasi yang transparan, serta kesiapan infrastruktur dan dukungan regulasi. Pelaksanaan solusi yang terstruktur dan tepat waktu penting untuk menghindari eskalasi konflik dan membangun kepercayaan publik.

5. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, FGD dengan tokoh masyarakat belum dapat menangani konflik. Tahap evaluasi ini mendorong untuk kembali ke tahap pengenalan dan diagnosis untuk mengidentifikasi akar konflik, memperbaiki pendekatan partisipatif, dan memahami dinamika kepercayaan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Provinsi Lampung:

1. Memahami Alur dan Penyebab Terjadinya Konflik

Pemerintah perlu mengulang tahap pengenalan dan diagnosis masalah dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan mendalam seperti melalui survei sosial. Langkah ini penting dilakukan untuk mengatasi masalah rendahnya partisipasi masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran, membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

2. Penyusunan Dokumen Kesepakatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah perlu menyusun dokumen kesepakatan resmi yang dirancang secara partisipatif bersama masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama dan juga instrumen legal-formal yang dapat digunakan sebagai dasar akuntabilitas publik. Dokumen ini sebaiknya memuat secara rinci, jadwal pelaksanaan proyek,

komitmen pelibatan masyarakat, serta jaminan perlindungan sosial dan lingkungan. Masalah yang ingin diatasi melalui dokumen ini adalah minimnya kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek, serta ketiadaan kerangka legal-formal yang menjamin hak dan partisipasi publik. Harapannya, penyusunan dokumen kesepakatan partisipatif ini dapat membangun rasa memiliki masyarakat terhadap proyek, menciptakan relasi kerja sama yang setara antara pemerintah dan warga, serta mengurangi potensi konflik karena ada kepastian aturan yang disepakati bersama.

3. Pelibatan LSM sebagai Mitra Pembangunan

Pemerintah disarankan untuk melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, untuk berperan sebagai fasilitator pelibatan warga sekaligus pengawas independen yang mendorong akuntabilitas dan transparansi proyek. Kemitraan ini penting untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat proses pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Harapannya, pelibatan LSM secara aktif dapat membantu membentuk ruang dialog yang lebih setara, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, dan menciptakan proses pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Gravindo Persada.
- Amelia, A. D., & Ety D. S. (2024). Peran Komunitas Lokal dalam Membangun Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Lumbung Stroberi). *Journal Publicuho*, 7(2), 874–883. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.443>.
- Annidia, F. S., Rahiem, M. D. H., & Nourwahida, C. D. (2023). Dampak Sosial Ekonomi dari Pendirian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Pemrosesan Sampah Bagi Masyarakat Cipayung, Depok, Jawa Barat. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6464>.
- Aprillinda, A. B. (2023). *Monitoring dan Evaluasi Bagian Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Berkelanjutan pada Daerah Kabupaten Blitar*. (Laporan Praktik Kerja Lapangan, Universitas Islam Blitar). <https://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/250/11/laporan%20pkl%20fiks.pdf>.
- Artha, H. F., Akmal, d., & Nurhabibi, P. (2019). Analisis Stakeholder dalam Konflik Revitalisasi EmplACEMENT Stasiun Kereta Api. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 61. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.61-66>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia. 79 hal.
- Bima, K. (2015). *Teori Sosiologi Modern: Teori Konflik Lewis A. Choser*. <https://www.researchgate.net/publication/327497761>. Diakses pada 7 Januari 2025. Pukul 09.30 WIB.
- Costa, C. (2018). *Sistem Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Menciptakan Kota Yang Berkelanjutan*. (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung). <https://repository.unissula.ac.id/11987/>.

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Akhir Feasibility Study Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung*. Provinsi Lampung. 286 hal.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Akhir Master Plan Pembangunan TPA Regional Provinsi Lampung*. Provinsi Lampung. 337 hal.
- E Watungadha, Fi. (2020). *Strategi Manajemen Konflik Organisasi Sektor Publik*. Malang: Media Nusa Creative. https://www.google.co.id/books/edition/strategi_manajemen_konflik_organisasi_se/dltseaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=strategi+manajemen+konflik&pg=pa60&printsec=frontcover. Diakses Pada 7 Januari 2025. Pukul 12.30.
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik (The Existence of the Political Parties in Public Perception). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>.
- Fadhilah, P. (2024). Konflik Kepentingan dalam Implementasi Pembangunan Wisata Religi di Desa Bogor. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 179–185. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i2.1178>.
- Fathurrohman, M. F., & Kartini, D. S. (2023). Manajemen Konflik Oleh Pemerintah Desa dalam Kasus Penambangan Tanah di Gunung Geulis Tahun 2019. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 226–250. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.2937>.
- Fauzan, M., Rasanjani, S., & Alqarni, W. (2023). Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh Dengan Masyarakat Gampong Pande Terhadap Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Di Lokasi Cagar Budaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(2), 1–11. www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip.
- Fernandi, T. (2023). Pembangunan TPA Regional Terkendala Selama 4 Tahun, DPRD Lampung Ungkap Alasannya. <https://lampung.rilis.id/pemerintahan/berita/pembangunan-tpa-regional-terkendala-selama-4-tahun-dprd-lampung-ungkap-alasannya-lxahqmu?page=2>. Diakses pada 7 Januari 2025. Pukul 14.40 WIB.
- Ghani, M. Al., Parlindungan, D. M., & Delansyah, M. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Guna Sampah Anorganik di Wilayah Legoso Raya Rt 001/001 Pisangan Ciputat Timur. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*. [Http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat](http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat), 1–7.

- Gusnetta, E., & Afni, N. (2024). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Pertambangan (Studi Kasus PT Agincourt Resources). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 301–310.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Fatmi, E., Rahmatul, R., Asri, R., Juliana, D., & Hikmatul, N. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, M. S. R., & Sidabutar, L. (2020). Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Urban: Elaborasi Hasil Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Taman Maju Bersama di Kelurahan Gandaria Utara di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(3), 142–147. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v26i3.17208>.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1281>.
- Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Ranga, K. K., Hasanuddin, T., & Syarief, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6, 922–935. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya922>.
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Koger, S. M., & Du Nann Winter, D. (2010). *The Psychology of Environmental Problems: Psychology for Sustainability*. In *Psychology Press* (3rd ed). Psychology Press.
- Kurnia, P. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal Of Diplomacy And International Relations*, 2(1), 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Kurniawan, F., Dila, S. V., & Nugroho, S. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Kelalaian Pengelolaan Sampah Di TPA Parit Enam Kota Pangkalpinang. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 599–611.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*. Sumedang: Alqaprint.

- Latif, M. (2024). *Solusi Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Bogor)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80787/1/skripsi_latif_36.pdf.
- Lionardo, A., & Kurniawan, R. (2021). *Pengelolaan Sampah: Perspektif Kebijakan Publik dan Kecerdasan Ekologi*. Palembang: Cv. Amanah.
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115.
- Manurung, D., Bintoro, Hadi, S., & Lubis, I. (2016). Analisis Pemilihan Wilayah Terkait dengan TPA Regional di TPST Bantargebang Menggunakan Metode Topsis. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/10.29122/jtl.v17i2.27>.
- Mariane, I., & Prasasti, A. S. (2023). Evaluasi Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung (Studi: Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rt Rw Kota Bandung Tahun 2011-2031). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 22–29.
- Marjan, A., Taufik, I., Nugraha, W. I., Pirngadi, B. H., & Fatah, F. (2024). Peningkatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Banten. *Journal of Management Review*, 8(1), 991–1004.
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*. Departemen Pekerjaan Umum. 37 hal.
- Meutia, I. F. (2017). Waste Bank: The Strategy and Community-Based Environmental Governance. *2nd SHIELD*, 244.
- Miles, M., & Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Muchsin, & Hambali. (2017). Model Pengembangan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah. *Seminar Nasional Ii Usm 2017*, 1, 178–185.
- Muhammad, T., Rasanjani, S., & Alqarni, W. (2023). Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Masyarakat Gampong Pande Terhadap Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Lokasi Cagar Budaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usk*, 8(2), 1–11. www.jim.unsyiah.ac.id/fisip.

- Nafis, W. (2020). Penyelesaian Konflik Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul*, 20(3), 1–30. <https://ojs.bantulkab.go.id/index.php/jrd/article/view/42>.
- Nurhaliza, P., & Ginting, S. (2024). Tata Kelola Sampah di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. *Sajjana : Public Administration Review*, 02(02), 1–15.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008* tentang Pengelolaan Sampah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017* tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). *Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026*. 78 hal.
- Prasetya, D. A., & Setyawan, A. (2022). Analisis Potensi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.29244/jsil.7.2.181-190>.
- Prihantika, I., Atika, D. B., & Meutia, I. F. (2023). Partisipasi Civil Society dalam Penanggulangan Sampah di Lokasi Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. *Wacana Publik*, 17(2), 75-80.
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.46807/inspirasi.v11i1.1505>.
- Rijal, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Medan, Restu Printing Indonesia*, hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Rizki, M. (2023). *Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah Perkotaan di Wilayah Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Konsep Fiqh*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32700/1/muhammad%20rizki,%20150105117,%20fsh,%20htn.pdf>.

- Rizqi, M., & Fatkhun, F. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam Transparansi dan Kendala Pengelolaan Proyek Jalan Raya di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(June), 570–584.
- Salma, A., Rina, A., & Purnaweni, H. (2024). Public Private Partnership dalam Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Di TPA Putri Cempo, Kota Surakarta. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol 13 No, 1–23.
- Saputera, Z., Rustanto, B., & Tm. Marwanti. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Pemulung Melalui Daur Ulang Sampah. *Lindayasos : Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 01(1), 53–84.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung. (2025). *Timbulan Sampah Provinsi Lampung 2023*. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>. Diakses pada 7 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.
- Stevenin, Thomas J. (1997). *Mengatasi Konflik: Win-Win Solutions*. Jakarta Barat: Metanoia Publishing.
- Sy, A., Frinaldi, A., & Rembrant. (2024). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Limbah Domestik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2*, 763–766. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/10259/9845>.
- Urrahmi, M., & Putri, N. E. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 9–17. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.119>.
- Utomo, W. (2017). *Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. <https://kppip.go.id/opini/tantangan-pembangunan-infrastruktur-indonesia/>. Diakses pada 24 Maret 2025. Pukul 10.00 WIB.

- Winanda, L. A. R., Marianti, A., Wahyani, W. (2020). Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Abm Mengabdi*, 7(1), 28–30. <https://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jam/article/view/597>.
- Yunitasari, A. I. (2018). *Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada TPA Randuagung Singosari Kabupaten Malang)*. (Skripsi, Universitas Brawijaya). <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162780/>.
- Yusri, A., Rahma, A., & Koko, I. W. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat di Wilayah Berkembang Berpartisipasi dalam Pengolahan Sampah Menggunakan Metoda Black Soldier Fly (Studi Kasus: Kecamatan Pantai Labu, Sumatera Utara). *Jurnal Permukiman*, Vol. 18 No, 103 – 112.